

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi, Hamzah, 1998, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia retribusi ke Reformasi*, Cet.1, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Asikin, Amirudin, Zainal 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2*, Sinar Baru, Bandung.
- Madril, Oce & Hasrul Halili, 2011, *Pengertian Korupsi dalam Hukum Anti Korupsi*, USAID, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, 1991, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masas Depan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moelyatno, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nurdjana, GM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta.
- Paul, St., 1990, *Black's Law Dictionary. Sixth edition*.
- Prodjodikoro, Wiryo, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Ilmu Hukum*, Cet.6, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana I A dan I B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sumigar, Bernhard Ruben Fritz, 2015, *Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi terhadap Tata Hukum Pidana Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Tim Pengajar Hukum Pidana UI, 2014, *Position Paper (RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*, Bidang Studi Hukum Pidana UI, Jakarta.

Zachrie, Wijayanto dan Ridwan, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2015, *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

JURNAL, LAPORAN DAN SKRIPSI

Achmadi, Faiz Azhar, 2019, "Politik Hukum Pidana terhadap Delik Korupsi dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta Implikasinya terhadap Pidana Mati", dalam *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hairi, Prianter Jaya, "Model Kodifikasi dalam RUU KUHP", *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. VIII, No. 18/II/P3DI/September/2016.

Hairi, Prianter Jaya, "Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Model Kodifikasi Dalam RUU KUHP" dalam *Jurnal Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. VIII, No. 18/II/P3DI, September 2016.

Hall, Jerome, "Codification of the Criminal Law", dalam *Jurnal American Bar Association*, Vol.38, No. 11, November 1952.

Hiariej, Eddy O.S, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.

Murillo , Maria Luisa, “The Evolution of Codification In The Civil Law Legal System: Towards Decodification And Recodification” Jurnal Transnational Law and Policy , Vol. 11 Nomor 1.

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, 2015, “Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum”, Jurnal Advokasi Vol. 5.

Syahbudin, Andi, 2019, “Dinamika Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Syahputra, “Implikasi Perumusan Delik Korupsi di Dalam Kebijakan Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, Juli- September 2015

KONVENSI

United Nations Covention Againts Corruption, 2003 (UNCAC), General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi)

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik RUU HP 2015

MAKALAH/SEMINAR

Harkrisnowo, Harkristuti, 2014, “KPK Tidak Usah Galau”. Dalam Buku Seminar RKUHP, Bidang Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum – UI

Hiariej , Eddy OS, “Delik Korupsi dalam RUU KUHP”, disampaikan dalam Bulak Sumur Legal Discussion, Kamis 13 September 2018 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Mudzakkir, “Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang”, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana (3-5 November, 2010)

Muladi, “Analisis Tentang Kemungkinan Pengaturan Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Administratif di Luar KUHP”, makalah disampaikan pada Rapat Panja RUU KUHP tanggal 20 September 2016 di Komisi III DPR RI.

Muladi, “Hal-Hal Sebelum Memasuki Pembahasan Buku II RUU KUHP Tentang Tindak Pidana”, makalah disampaikan pada Rapat Panja RUU KUHP tanggal 15 September 2016 di Komisi III DPR RI

ARTIKEL TULISAN

Hiariej, Eddy OS, “Lex Specialis” dalam Hukum Pidana, Kompas, 12 Juni 2018.

Hiariej, Eddy OS, “Memahami Delik Korupsi di Rancangan KUHP”, Tempo, 4 Juli 2018

Hiariej, Eddy OS, “Menjawab Keberatan KPK”, Kompas, 12 Juli 2018.

Hiariej, Eddy OS, “Penegakan Hukum Kejahatan Luar Biasa” Kompas, 28 Desember 2018

Hiariej, Eddy OS, “Lex Specialis” dalam Hukum Pidana”, Kompas, 12 Juni 2018.

Hiariej, Eddy OS, “Memahami Tindak Pidana Korupsi”, Kompas, 25 Mei 2015.

Ginting, Miko, “Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”, Tempo, 27 Juni 2018

Muladi, “Menyongsong 101 Tahun KUHP Kolonial”, Kompas, 15 Desember 2018

INTERNET

<http://icjr.or.id/presiden-keluarkan-surpres-rancangan-kuhp-2015/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

<https://icjr.or.id/rancangan-kuhp-berbau-kolonial-minim-perlindungan-rakyat-pengesahannya-tidak-boleh-dipaksakan/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

[https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/19411171/ini-alasan-pemerintah-usulkan-tindak-pidana-korupsi-diatur-dalam rkuhp?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/19411171/ini-alasan-pemerintah-usulkan-tindak-pidana-korupsi-diatur-dalam-rkuhp?page=all), diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/03/07232851/prof-muladi-rkuhp-tidak-ada-alasan-ditunda-lagi-harus-disahkan>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019

[https://nasional.kompas.com/read/2018/06/08/09375731/menurut-kpk-lebih-baik-revisi-uu-tipikor-daripada-aturn korupsi-lewat-kuhp](https://nasional.kompas.com/read/2018/06/08/09375731/menurut-kpk-lebih-baik-revisi-uu-tipikor-daripada-aturn-korupsi-lewat-kuhp), diakses pada 16 Desember 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korup>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019

<https://kbbi.web.id/narasumber>, diakses pada 19 Desember 2019

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/807-urgensi-pembaruan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020

<https://mediaindonesia.com/read/detail/201885-uu-tipikor-adopsi-rekomendasi-uncac>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/13361771/indonesia-baru-selesaikan-8-dari-32-rekomendasi-uncac-putaran-i>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematikapembahasan-rkuhp>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4720804/para-profesor-begawan-hukum-di-belakang-ruu-kuhp/2>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee0dbbe2e2f1/draf-kuhp-dinilai-sudah-basi/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt595f61d1e953a/rkuhp-bakal-jadi-konstitusinyahukum-pidana-nasional>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4c885db3272/kepala-bphn-prof-enny-nurbaningsih--menyoal-delik-delik-kontroversial-dalam-rkuhp/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020

<https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/gap-analysis-indonesia-terhadap-uncac>, diakses pada 27 Maret 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a468474748df/akhir-nasib-delik-korupsi-dalamrkuhp>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/15253261/pemerintah-hilangkan-pasal-terkait-korupsi-di-sektor-swasta-dalam-rkuhp>, diakses pada 22 Maret 2020.

<https://antikorupsi.org/id/TolakRKUHP>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020

<http://www.koran-jakarta.com/delik-korupsidalam-rkuhp/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020

<https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2581-enam-puluh-persen-korupsi-di-indonesia-terjadi-di-sektor-swasta>, diakses pada 26 Maret 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/15253261/pemerintah-hilangkan-pasal-terkait-korupsi-di-sektor-swasta-dalam-rkuhp>, diakses pada 26 Maret 2020

<https://kbr.id/nasional/022018/pemerintah-usulkan-pelanggaran-ham-berat-genosida-dan-kejahatan-perang-masuk-rkuhp/94891.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b3e115e6492/perlu-kejelasan-model-kodifikasi-dalam-rkuhp/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020

<http://www.koran-jakarta.com/delik-korupsidalam-rkuhp/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020

<http://koransindo.com/page/news/2018-07-17/1/0/Memahami-Konsep-RUU-Hukum-Pidana> diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b17b19bc6920/tim-perumus-rkuhp-bantahlemahkan-kewenangan-kpk>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

https://antikorupsi.org/sites/default/files/siaran_pers_waspadai_rkuhp_yang_melemahkanupaya_pemberantasan_korupsi_0.pdf, diakses pada 25 Maret 2020

<https://nasional.tempo.co/read/1094959/10-alasan-kpk-tolak-masuknya-delik-korupsi-dalam-rkuhp/full&view=ok>, diakses pada tanggal 30 Maret 2020